

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di madrasah

1. Prosedur Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di Madrasah.

Ketika kita melihat lembaga pendidikan yang baik, tampilannya asri, semua fasilitas tertata dengan baik. Seluruh warga sekolah dan keluaran disana berkualitas baik serta akhlakul karimah yang melekat disetiap perilaku peserta didiknya. Tentunya seiring dengan itu kita juga akan membayangkan bahwa lembaga pendidikan tersebut memiliki perencanaan yang begitu baik pula. dan sesuai dengan SOP yang standar dalam membuat sebuah perencanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Waktu dan tahapan dalam membuatnya berdasarkan yang biasa dilaksanakan adalah sebelum awal tahun anggaran berjalan. Dalam membuat sebuah perencanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah ada sebuah standar operasional prosedur (SOP) yang harus dibuat, sesuai dengan landasan teori bahwa SOP yang dibuat oleh madrasah ternyata masih harus disesuaikan dengan kriteria SOP perencanaan pembiayaan yang seharusnya disiapkan, yakni belum memiliki komponen-komponen seperti.

- a. Menyusun usulan program beserta rencana anggaran
- b. Mengundang komite madrasah/ perwakilan guru dalam penyusunan RAPBM.
- c. Bersama komite mengajukan pembahasan program dan rencana anggaran yang dilaksanakan.
- d. Mengkompilasi seluruh rencana anggaran.

Langkah kreatif yang telah dibuat kedua MI dalam mengatur anggaran madrasah

1. Membuat perencanaan anggaran yang obyektif

Pada waktu perencanaan mereka membuat anggaran operasional madrasah dengan tujuan utama sebagai inti perencanaan tahunan. Mempunyai perencanaan obyektif untuk menekan risiko munculnya permasalahan pada keuangan dan manajemen. Yaitu dengan cara, Menyeimbangkan anggaran dalam penggunaan anggaran agar dapat memenuhi semua keperluan yang dibutuhkan. Kemudian membuat skala prioritas dalam perencanaan anggaran, terutama belanja pada kebutuhan produktif seperti sarana pembelajaran. Tidak menggunakan uang untuk hal yang tidak perlu. Serta melakukan pembahasan terhadap kinerja dan pengeluaran sekolah. Memperhatikan apakah terjadi kelebihan anggaran pada kegiatan ataupun penurunan kualitas layanan. Pemakaian data terdahulu untuk menyusun rencana anggaran yang obyektif, walau terasa sulit menganalisis kebutuhan berdasarkan data terdahulu dikarenakan perubahan.

2. Membuat Rencana Prioritas Program

Merencanakan semua program prioritas dengan baik, dikarenakan kesalahan pada perencanaan program akan sangat berpengaruh terhadap hasil dan pencapaian tujuan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika membuat prioritas dan menetapkan tujuan penganggaran. Diperlukan kreativitas dari tim perencana dan manajemen saat melakukan pengembangan ide-ide baru. Seperti, memastikan perencanaan program secara keseluruhan mempunyai tujuan spesifik, Menganalisa tujuan dan membuat perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk

program tersebut, serta mendiskusikan tentang masalah yang membuat program terdahulu tidak berjalan dengan baik.

3. Membuat Analisis Biaya dan Sumber Daya

Manajemen harus menganalisis pengeluaran dan perkiraan pendapatan tahunan sekolah. Dengan menerapkan cara menentukan manfaat dari program yang telah ditetapkan serta menghitung nilai barang tersebut. Kemudian menghitung biaya, baik untuk program prioritas serta biaya lainnya seperti sarana dan prasarana dan biaya perawatan. Selanjutnya membandingkan antara pengeluaran sumber daya dan manfaatnya pada masing-masing program dan kegiatan kemudian mengevaluasi pengeluaran dan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin tidak ada kelebihan pengeluaran anggaran serta mengkalkulasikan semua faktor yang dibutuhkan madrasah seperti sumber daya manusia (guru, tendik), peralatan, fasilitas dan material.

4. Membuat Rencana Implementasi Keuangan

Perencanaan implementasi keuangan madrasah yaitu dengan memastikan seluruh pihak memahami dan mengerti tujuan bersama serta pencapaian misi. Kemudian menciptakan arah dan panduan dalam menentukan keputusan, target dan fokus terhadap penggalangan dana operasional yang harus ditetapkan, penetapan nilai dan jumlah alokasi anggaran secara spesifik serta berorientasi terhadap peluang masa depan, melakukan evaluasi perangkat serta alat yang diperlukan untuk event dan kegiatan yang akan datang serta penyusunan tim organisasi secara efektif.

5. Kestinambungan Rencana dan Anggaran

Membuat anggaran baru pada awal tahun, Membuat penyesuaian anggaran di pertengahan tahun dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja.

Metode penganggaran lama tentu saja tidak akan bekerja dengan baik, dengan demikian, pihak manajemen madrasah harus lebih kreatif dalam mencari peluang. Selain itu, kampanye dan promosi untuk menarik siswa baru yang potensial juga dilakukan yang bertujuan menyeimbangkan finansial sekolah.

Dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di madrasah ini, Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Kuin maupun madrasah ibtidaiyah Al Istiqamah Banjarmasin tidak membuat secara khusus Standar operasional prosedur (SOP) tetapi menurut penuturan kedua sumber mereka hanya membuat perencanaan yang sederhana sesuai petunjuk teknis penggunaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga penggunaan keuangan sumbernya dari pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disarankan kedepannya agar kedua madrasah ini dapat membuat SOP yang standar yang memiliki komponen komponen seperti yang disebutkan pada teori diatas.

2. Pihak Terkait dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di Madrasah

Dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembiayaan di madrasah semua stakeholder dari unsur yayasan, Kepmad, komite serta seluruh dewan guru harus dilibatkan dalam upaya pemberdayaan semua unsur yang terkait.

Penyediaan dana pendidikan dan tanggung jawab pembiayaan pendidikan sudah diatur melalui peraturan dan undang-undang. Melalui UU Tahun 2003 No.20

bab XIII pasal 46 ayat 1 mengenai tanggung jawab pendanaan dijelaskan pendanaan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemda dan masyarakat. Selanjutnya pasal 47 ayat 1 dan 2 mengenai sumber pendanaan pendidikan yang disebutkan sumber tersebut ditentukan atas dasar prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Pemerintah, pemda serta masyarakat memberikan arahan sumber daya yang ada sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda dan Madrasah Ibtidaiyah Al Istiqamah Banjarmasin dalam pengelolaan pembiayaannya telah merangkul semua stakeholder dari unsur yayasan, Kepmad, komite serta seluruh dewan guru, sebagaimana halnya yang telah diatur dalam UU Tahun 2003 No.20 bab XIII pasal 46 ayat 1 dan pasal 47 ayat 1 dan 2 tentang sumber pembiayaan pendidikan .

Keterlibatan yayasan dalam pengelolaan pendidikan baik di MI Darul Huda Kuin maupun di madrasah ibtidaiyah Al Istiqamah Banjarmasin sangat besar peranannya dalam rangka menggali dana keluar dan dikelola yayasan, Sedangkan dalam hal pengelolaan dana BOS diserahkan pengelolaan kepada kepala madrasah.

3. Dokumentasi Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di madrasah

Pendokumentasian terhadap perencanaan pembiayaan pendidikan sangat diperlukan sebagai bahan untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada semua pihak serta instansi yang berwenang untuk mengetahuinya seperti pihak kementerian dan juga kepada stakeholder guna melakukan kontrol serta untuk mengetahui keefektifan dan keefesienan penggunaan terhadap dana pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pihak madrasah sebagai pengguna anggaran

Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang asalnya dari masyarakat, orang tua siswa dan pemerintah dilaporkan dengan terperinci dan transparansi sesuai sumber dananya. Kepala madrasah wajib melaporkan pada bidang keuangan khususnya tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah setiap triwulan, per semester, ataupun setiap akhir periode anggaran melalui penerapan prinsip kejujuran dan transparansi dalam pertanggungjawaban yang senantiasa dijunjung tinggi.

Madrasah Ibtidaiyaharul Huda melakukan proses pendokumentasian pada waktu rapat, menulis semua agenda rapat serta hasilnya serta foto dokumentasinya. Kemudian semua dokumen tersebut dihimpun pada suatu tempat yang memudahkan untuk dicari dikemudian hari untuk proses pembuatan pertanggungjawaban. Selain itu juga terhadap semua yang berkenaan dengan pengelolaan pembiayaan madrasah juga dilakukan pendokumentasian dengan baik dan teratur.

Madrasah Ibtidaiyah Al Istiqomah Pekapuran Banjarmasin melakukan pendokumentasian terhadap semua pengelolaan keuangan madrasah dengan baik, salah satunya adalah dengan menempel setiap pengadaan barang barang yang dibeli dari tempelan yang sudah diberi kode dan penjelasan sumber Madrasah Ibtidaiyah Al Istiqomah Pekapuran Banjarmasin telah melaksanakan sistem pendokumentasian dengan baik, sehingga dapat melakukan proses pelaporan dengan mudah dikarenakan semua dokumen tersedia dengan baik dan rapi.

4. Strategi dan Metode dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Menjadikan sebuah lembaga pendidikan yang baik, maju dan berkembang adalah merupakan suatu keinginan atau cita-cita dari sebuah tujuan dibangunya

sebuah lembaga pendidikan, serta mempunyai prestasi akademik maupun non akademik. Akan tetapi supaya terwujud semua itu diperlukan langkah langkah atau strategi dalam merencanakannya, terutama dalam rencana pembiayaan pendidikan. Sebagaimana pula yang dilaksanakan lembaga pendidikan Islam MI Al Istiqomah yang berada dalam pembinaan yayasan pondok pesantren AL Istiqomah Pekapuran Banjarmasin. Mempunyai strategi dalam mengelola pendidikan yang mereka jalankan, Berada di pemukiman padat penduduk dan mempunyai siswa yang kebanyakan dari kalangan menengah kebawah, tidak menyurutkan keinginan dari para pengelola untuk bertekad menjadikan madrasah maju dan berkembang. Mengingat besarnya pembiayaan yang diperlukan dalam mengembangkan sebuah lembaga pendidikan, menuntut semua stakeholder untuk mempunyai kreativitas yang tinggi untuk mencari tambahan dana guna melaksanakan semua program yang telah direncanakan dalam usaha pengembangan madrasah.

Setiap lembaga pendidikan mempunyai strategi atau metode yang mungkin saja berbeda dari segi teknisnya, tapi secara tujuan akhir dapat dipastikan bahwa pihak pengelola madrasah tentunya berkeinginan untuk menjadikan madrasah yang dikelola menjadi semakin maju dan berkembang serta mempunyai prestasi akademik maupun non akademik.

Beberapa komponen yang harus dibiayai pada penyelenggaraan satuan pendidikan di jenjang pendidikan madrasah swasta tingkat Madrasah Ibtidaiyah supaya mempunyai daya saing dan kualitas dengan jenis-jenis pendidikan sekolah lainnya. Kebutuhan tersebut meliputi 7 komponen utama, yaitu komponen:

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- b. Kesejahteraan Sumber Daya Manusia
- c. Pemeliharaan dan Penggantian
- d. Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar
- e. Jasa dan Daya.

Dari semua komponen diatas tergambar daftar yang harus menjadi perhatian utama dalam rangka mengelola sebuah lembaga pendidikan. Mengingat besarnya pembiayaan yang diperlukan dalam mengembangkan sebuah lembaga pendidikan, menuntut semua stakeholder untuk mempunyai kreativitas yang tinggi untuk mencari tambahan dana guna melaksanakan semua program yang telah direncanakan dalam usaha pengembangan madrasah. Serta mengutamakan hal yang paling penting atau berdasarkan skala prioritas.

Guna melaksanakan semua program yang telah direncanakan dalam usaha pengembangan MI Darul Huda Kuin dalam hal pengelolaan pembiayaan mengutamakan hal yang paling penting atau berdasarkan skala prioritas.

Melihat Strategi dan metode dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di kedua madrasah , disarankan sepertianya Perlu pengkajian ulang terhadap strategi dan metode dalam perencanaan penggunaan pembiayaan pada madrasah.

5. Penyimpanan dan Pengamanan Dana Pendidikan

Merujuk pada perundang undangan tentang dana pendidikan yang dituangkan dalam juknis BOS, dana yang telah tersalurkan disimpan di rekening atas nama satuan pendidikan dan dibukukan khusus secara terpisah oleh satuan pendidikan dari penerimaan dana penyelenggara satuan pendidikan. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa mengumpulkan, menyimpan dan penggunaannya diaudit oleh akuntan publik

dan dilaporkan kepada kementerian. Selain itu juga hal tersebut harus dipertanggungjawabkan secara transparan oleh satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan khususnya wali/ orang tua peserta didik dan penyelenggara satuan pendidikan.

Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Al Istiqomah telah melaksanakan proses penyimpanan dana pendidikan sesuai dengan petunjuk juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Penggunaan Dana Pendidikan di Madrasah

1. Alokasi Anggaran Pendidikan

Penggunaan dana pendidikan dialokasikan penganggarnya pada saat rapat bersama penyusunan RAPBM dan semua dialokasikan pendanaanya dengan melihat juknis BOS. Aspek penting yang harus diperhatikan terkait pengelolaan pembiayaan pendidikan ialah memprediksi kebutuhan pendidikan, Alokasi masing-masing komponen biaya, menganalisa sumber dana, Pengawasan keuangan, serta mencocokkan perencanaan dan penggunaan anggaran.

Walaupun berpatokan pada juknis BOS MI Darul Huda dalam penyusunan alokasi dananya tetap berprinsip pada prioritas kebutuhan madrasah. Kalau semua alokasi anggaran sudah ditetapkan bersama melalui rapat penyusunan RAPBM bersama sesuai dengan dana yang dibantu pemerintah untuk satu semester baru dijalankan sesuai rencana.

Sedangkan pada MI Al Istiqomah prioritas penggunaan dana pendidikan adalah untuk guru honor, yang kedua untuk pembelian ATK itu prioritas jadi untuk

perbaikan gedung dan pembelian alat-alat yang lain melihat daripada sisa dana yang tersedia.

Kekreatifan kedua madrasah dalam hal penggunaan dana adalah mereka gunakan secara efektif dan efisien sehingga semua kegiatan atau program yang dilakukan mempunyai dampak yang membuat madrasah semakin maju dan berkembang.

2. Prinsip-prinsip Penggunaan Anggaran

Perlu diperhatikan dari manajemen keuangan madrasah terkait sejumlah prinsip pada UU Tahun 2003 No. 20 pasal 48 yang menyatakan pengelolaan dana pendidikan atas dasar prinsip transparansi, keadilan, efisiensi dan akuntabilitas publik, bahkan ditekankan juga prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas juga harus ditekankan. Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda dalam hal merealisasikan prinsip penggunaan anggaran sudah mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Madrasah Ibtidaiyah Al Istiqomah dalam hal merealisasikan prinsip penggunaan anggaran juga sudah mengacu ke juknis , prinsip dari penyusunan anggaran disini itu terbuka, serta sesuai dengan juknis yang sudah ada.

3. Bukti-bukti Pengeluaran

Semua dukumen yang berhubungan dengan bukti penggunaan anggaran akan dipergunakan sebagai bahan pembuatan pertanggungjawaban terhadap pemerintah.

Bukti pengeluaran/ kuitansi asli disertai penyusunan bukti pendukung lain per digit/komponen penunjukan langsung barang dan jasa:

- a. Sampai dengan Rp.1.000.000 melampirkan kwitansi dan faktur pajak

- b. Pembelian diatas Rp.1.000.000 hingga Rp.5.000.000 melampirkan surat penawaran, surat pesanan, faktur pajak, kuitansi, berita acara serah terima/ penyelesaian pekerjaan.

Dalam mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan pendidikan di MI Darul Huda adalah dengan mempersiapkan segala dokumen yang berkenaan dengan penggunaan atau pengeluaran keuangan diantaranya adalah berupa tanda bukti pengeluaran atau kuitansi pengeluaran.

Dokumen berupa kwitansi dan nota perlu dalam mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan pendidikan di MI Al Istiqomah, mempersiapkan segala dokumen yang berkenaan dengan penggunaan atau pengeluaran keuangan diantaranya adalah berupa tanda bukti pengeluaran atau kuitansi pengeluaran

4. Dokumentasi (Pengadministrasian)

Administrasi keuangan madrasah ialah aktivitas pengelolaan dana yang terdiri dari perencanaan, penggunaan, pencatatan dana, pengawasan/ kontrol dan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan pendidikan dengan efisien dan efektif supaya tercapai tujuan pendidikan.

Pengelolaan Administrasi Keuangan madrasah meliputi,

- a. Perencanaan Keuangan madrasah yaitu melakukan perencanaan sumber dana dalam rangka sebagai penunjang aktivitas pendidikan. Perencanaan harus sesuai rencana kerja sekolah secara menyeluruh, dari pengembangan jangka pendek hingga jangka panjang. Serta mengacu terhadap penyelenggaraan pendidikan.¹

¹ (Karna Husni, Manajemen, 2014:281.)

- b. Pembelanjaan Keuangan madrasah mengacu perencanaan yang sudah ditentukan. Menjalankan sesuai mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan harus efisien, efektif dan benar. Maknanya masing-masing perolehan dana dalam pengeluarannya harus berdasarkan berbagai kebutuhan yang sudah disesuaikan melalui perencanaan pembiayaan pendidikan dan sesuai sumbernya.²
- c. Pembukuan Keuangan madrasah ialah aktivitas mencatat dan membukukan transaksi dari penerimaan hingga pengeluaran uang setiap hari oleh bendahara madrasah dengan tertib sesuai peraturan dan pedoman. Lengkapnya pembukuan dimulai dari mencatat berbagai sumber dana hingga jumlah dana serta distribusi penggunaan secara terperinci. Apabila terdapat pengeluaran beban pajak juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku.
- d. Pengawasan Keuangan madrasah ialah aktivitas dengan tujuan mencegah kesalahan dan penyimpangan pengelolaan keuangan madrasah. Pengawasan ini langsung dijalankan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya. Aktivitas pengawasan keuangan madrasah bertujuan mengetahui:
- 1) Kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan prosedur yang berlaku.
 - 2) Kesesuaian pencapaian hasil bidang teknis administrasi hingga operasional dengan penerapan peraturan.
 - 3) Kebermanfaatan sarana (manusia, perlengkapan, biaya dan organisasi) dengan efektif dan efisien.
 - 4) Sistem lainnya ataupun perubahan sistem untuk mencapai hasil sempurna.³

² (Fauzan, 2016: 89-90)

³ Fauzan, 2016:91-92

- e. Pertanggung jawaban Keuangan marasah meliputi penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan pelaporan dan melakukan pertanggungjawaban rutin sesuai peraturan. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang asalnya dari masyarakat dan orang tua siswa dilaporkan dengan transparan dan terperinci sesuai sumber dana. Sedangkan yang asalnya dari usaha mandiri sekolah juga harus dilaporkan dengan transparan dan terperinci kepada dewan guru dan staf sekolah.

Proses pendokumentasian/ pengadministrasian penggunaan dana pendidikan pada madrasah Ibtidaiyah Darul Huda berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), memenuhi semua apa yang harus dilaksanakan pada seluruh rangkaian proses pengadministrasian yang berhubungan dengan pembukuan.

Pendokumentasian/ pengadministrasian penggunaan dana pendidikan pada madrasah Ibtidaiyah Al Istiqomah Pekapuran Banjarmasin juga berjalan dengan baik dan sesuai SOP yang ditetapkan, memenuhi semua apa yang harus dilaksanakan pada seluruh rangkaian proses pengadministrasian yang berhubungan dengan pembukuan, dan saat ini untuk pelaporan BOS sudah memakai sistem aplikasi.

5. Pejabat kuasa Pengguna Anggaran pendidikan

Pejabat kuasa pengguna anggaran pada kedua madrasah yang diteliti adalah kepala madrasah, Pengguna anggaran yaitu istilah yang dicantumkan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di kementerian, lembaga, bagian dari SKPD ataupun pejabat yang setara dengan institusi pengguna APBD.

Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda dan Madrasah Ibtidaiyah AL Istiqamah dalam hal pejabat pengguna anggaran sudah melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Bendaharawan Keuangan di madrasah

Kordinasi dengan Bendahara madrasah harus terjalin dengan baik didalam mengatur segala bentuk keuangan di madrasah, karena bendahara adalah membantu kepala madrasah dalam menyusun, mengelola dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan sekolah, hal ini sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sebuah lembaga.

Tugas Bendahara Madrasah adalah Membantu Kepala madrasah melakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM), Menerima, menyimpan dan mengeluarkan dana sesuai perintah dan persetujuan Kepala Madrasah, Membuat administrasi keuangan meliputi buku kas Umum, buku Bank, buku kas Tunai, buku kas Harian, buku Pajak

MI Darul Huda dalam mengelola keuangan dimadrasah dibantu seorang bendahara yang bernama Ibu Nurul Hidayah. pada MI Al Istiqamah dalam mengelola keuangan dimadrasah dibantu seorang bendahara yang bernama Ibu Aulia Wati,S.Pd.I yang walaupun kedua bendahara dikedua madrasah ini secara keilmuan kebendaharawan belum pernah secara khusus mendapatkan diklat, tetapi berkat kekreativan mereka dalam menggali keilmuan tentang kebendarawanan, pengalaman lapangan bendaharawan tersebut dapat memenuhi fungsinya sebagai bendahara dalam

mengelola keuangan terutama keuangan BOS. Dan melakukan pekerjaannya sesuai apa yang sudah ditetapkan juknis BOS dari Kementerian Agama.

C. Efektivitas dan Efisiensi dana Pendidikan

1. Efektivitas Dana Pendidikan

Keberhasilan lembaga pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan berkualitas tidak lepas dari perencanaan yang mantap, alokasi tepat sasaran dan efektif sehingga menjadikan semua komponen bersinergi dan memberi hasil maksimal terhadap tujuan yang dicapai.

Efektivitas ialah pencapaian tujuan dengan tepat atau pemilihan tujuan berdasarkan rangkaian alternatif ataupun pilihan cara serta menentukan pilihan atas dasar pilihan-pilihan lainnya. Efektivitas juga dimaknai pengukuran keberhasilan terhadap mencapai tujuan yang sudah ditetapkan..

Efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan output sesuai harapan. Artinya, jika mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai perencanaan, dalam waktu, biaya serta berkualitas, sehingga dinamakan efektif.⁴

2. Efisiensi Dana Pendidikan

Definisi efisiensi ialah ukuran dari perbandingan perencanaan pemakaian masukan dengan realisasinya ataupun perkataan lainnya mengenai yang sesungguhnya.⁵

Dalam melaksanakan seluruh aktivitas proses belajar mengajar pada MI Darul Huda dan juga pada MI Al Istiqomah, Penggunaan dana pendidikan dapat berjalan

⁴ Ravianto (2014:11),

⁵ Mulyamah (1987:3),

secara efisien dan efektif sehingga membantu madrasah untuk mencapai tujuan, visi dan misi madrasah.

D. Fundraising Dana Pendidikan di Madrasah

1. Sumber Dana Pendidikan

Fundraising sebagai usaha meyakinkan orang lain supaya mau menyumbang dan menunjukkan melakukan aktivitas tersebut penting.⁶ *Fundraising* ialah proses mempengaruhi masyarakat secara individu ataupun perwakilan masyarakat hingga lembaga supaya menyalurkan dananya kepada organisasi dalam hal ini lembaga pendidikan.

Berbagai upaya menggali dana ke berbagai pihak sumber pembiayaan pendidikan diantaranya.

- a. Pemerintah pusat dan pemda: mengupayakan supaya meningkatkan alokasi terhadap sektor pendidikan, memanfaatkan dana dengan efisien dan efektif, serta mengupayakan alokasi untuk sektor pendidikan yang berasal dari pajak umum.
- b. Orang tua peserta didik : memberikan pemahaman orang tua supaya tertib pembayaran SPP dan mau memberikan pendanaan lain yang diijinkan pemerintah, memanfaatkan dana dari orang tua siswa dengan efisien dan efektif.

⁶ Michael Norton, *Menggalang Dana: Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-Negara Selatan*, diterjemahkan oleh Masri Manis, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h.15.

- c. Masyarakat: mengajak kesediaan dunia usaha sebagai fasilitator praktik peserta didik, melakukan himbauan supaya bersedia mendanai dunia pendidikan.
- d. Pihak lain (institusi) mengupayakan bentuk kerja sama tidak saling mengikat akan tetapi menguntungkan serta mempertimbangkan berbagai bentuk pinjaman supaya tidak memberatkan di kemudian hari.
- e. Dana hasil usaha mandiri yang halal antara lain penyewaan alat, koperasi, kopma. Perencanaan Anggaran dan Belanja Lembaga Pendidikan

Di Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda dalam menggalang dana pendidikan melalui masyarakat adalah bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa, Kegiatan jum'at taqwa diakhir acara, diedarkan masyarakat/komite, oleh pengurus komite dibijaksanai bahwa infaq dari orang tua terhadap kotak infaq sebagai sarana mendidik siswa agar suka berinfaq dan bersedekah, yang hasil dari kegiatan tersebut juga dipergunakan untuk menambah dana pendidikan di MI Darul Huda Kuin Banjarmasin, juga sudah melakukan MoU dengan dinas pertanian dan perikanan kota Banjarmasin.

Sedangkan pada MI AL Istiqamah pembiayaan proses pendidikannya selain dari dana BOS Juga bantuan infaq dari mengadakan program unggulan berupa kegiatan program tahfiz/tilawati yang pengelolaannya langsung diserahkan kepada kepala madrasah dan hasil infak dari penyelenggaraan program tersebut digunakan untuk membantu kegiatan program/ operasinal madrasah .

Kekreatifan kedua madrasah dalam penggalian dana adalah mereka selalu aktif membuat dan menyerahkan proposal bantuan baik kepada instansi pemerintah yaitu melauai bidang kesra baik dikota maupun propinsi maupun pihak swasta seperti

pihak jasa raharja, pilindo serta pada tiba bulan Ramadhan pihak madrasah menyebar amplop infaq,sadaqah dan wakaf untuk diprgunakan untuk pengembangan madrasah .

2. Strategi dan Metode *Fundraising* di madrasah

Fundraising adalah aktivitas menggalang ataupun menghimpun dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lain dari masyarakat secara perorangan, kelompok, perusahaan dan organisasi yang kemudian disalurkan untuk mustahik. Aktivitas ini terdapat 5 tujuan pokok, antara lain menghimpun dana, donatur, pendukung ataupun simpatisan, membangun citra lembaga (brand image) serta memberi kepuasan kepada donatur.

Ketika menjalankan aktivitas penggalangan dana (*fundraising*), berbagai teknik dan metode bisa dilakukan. Metode sebagai wujud aktivitas dengan karakteristik organisasi yang bertujuan menggalang dana dari masyarakat. Pada dasarnya metode ini bisa dibagi dua jenis yakni langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*).

- a. Penggalangan dana langsung (*direct fundraising*), ialah metode memakai cara ataupun teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung.
- b. Penggalangan dana tidak langsung (*indirect fundraising*) ialah cara ataupun metode yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Bentuk dari fundraising ini tidak dilakukan dengan memberi daya akomodasi langsung terhadap respon lembaga donor atau donatur seketika.⁷

⁷ Fahrurrozi

Pengembangan madrasah telah dilakukan oleh Yayasan pendidikan Al Huda Kuin Banjarmasin melalui beberapa kegiatan diantaranya ada koperasi. Sumber dana kami dari koperasi kemudian ada tambak, Tambak itu hasil dari kerja sama kami dengan perikanan, Kemudian lagi kami ada bibit tanaman, dan itu pun penjualannya bisa kami share lewat online dengan orang tua siswa.

Sedangkan pengembangan madrasah telah dilakukan oleh Yayasan pondok pesantren Al Istiqomah Banjarmasin dalam melakukan fundraising, yaitu hanya bertumpu pada program unggulan sistem Tilawati, sehingga perlu lagi untuk berkreasi untuk menambah bentuk usaha penggalan dana dalam rangka pengembangan madrasah kedepan.

Aktivitas menggalang ataupun menghimpun sumber daya lain dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk pengembangan madrasah telah dilakukan oleh kedua madrasah.

3. Komunikasi dalam menjalin hubungan dengan stakeholder

Pada hakekatnya membangun komunikasi efektif di sekolah sebagai proses membangun hubungan harmonis antar warga sekolah dalam lingkungan internal sekolah dan eksternal sekolah bersama stakeholder. Komunikasi sebagai proses antar orang atau antar pribadi yang melibatkan upaya mengubah perilaku.

Proses komunikasi secara konsep diawali dari gagasan, pemikiran ataupun informasi yang diharapkan diperhatikan orang lain, berwujud lambang tertentu dan berwujud pesan tertentu. Penyampaian pesan berwujud kode ataupun lambang

selanjutnya disalurkan melalui suatu media berbentuk tulisan, tatap muka, media cetak maupun media teknologi (elektronika ataupun internet).

Tujuan nyata dari hubungan masyarakat dengan sekolah diantaranya.

- a. Kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik dilakukan oleh guru.
- b. Mengambil peran memahami berbagai kebutuhan masyarakat.
- c. Berguna mengembangkan berbagai program sekolah kearah lebih maju dan membunsi supaya bisa dirasakan langsung pengguna jasa pendidikan yaitu masyarakat.
- d. Melakukan kerja sama lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak.

Dalam mengelola Madrasah Ibtidaiyah Darul huda Kuin Banjarmasin selalu menjaga hubungan baik dengan stakeholder dengan terus membina komonikasi dalam rangka untuk terus mengembangkan madrasah kearah yang labih baik dan maju. Begitu juga halnya dengan madrasah ibtidaiyah Al Istiqomah Pekapuran Banjarmasin jug selalu menjaga hubungan baik dengan stakeholder dengan terus membina komonikasi dalam rangka untuk terus mengembangkan madrasah kearah yang labih baik dan maju dan berkembang.

E. Akuntabilitas Dana Pendidikan di madrasah

1. Laporan Dana Pendidikan

Laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan juga dana yang diperoleh dari masyarakat atau komite tidak terlepas dari prinsip akuntabilitas dan transparansi serta dalam pertanggungjawabannya selalu memperhatikan

petunjuk teknis yang sudah diberikan oleh pihak kementerian untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan. sehingga dengan menerapkan prinsip serta aturan yang berlaku tersebut sekolah jauh dari berbagai masalah.

Laporan keuangan dana BOS meliputi Rincian rencana kegiatan dan anggaran (RKAS), Buku pembantu kas, Buku kas umum, Buku pembantu pajak, Buku pembantu bank, syarat penggunaan dana BOS, Realisasi penggunaan dana BOS, Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, surat permintaan pembayaran, bukti/kuwitansi penerimaan, dan bukti/kuwitansi pembayaran pengeluaran dari sekolah/madrasah (Sumber : juknis BOS).

Pada madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Kuin Banjarmasin telah memperhatikan prinsip serta aturan tentang sistem pelaporan keuangan BOS sebagaimana yang terdapat pada Juknis. Demikian juga halnya dengan apa yang telah dilaksanakn pada madrasah Ibtidaiyah Al Istiqomah Pekapuran Banjarmasin telah memperhatikan prinsip serta aturan tentang sistem pelaporan keuangan BOS sebagaimana yang terdapat pada Juknis laporan BOS.

Semua hal yang berkenaan dengan pelaporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh kedua madrasah ibtidaiyah telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga tidak pernah bermasalah dengan lembaga yang berwenang untuk melakukan monitoring atau audit .

2. Media Komonikasi dan Informasi Dana Pendidikan di Madrasah

Komonikasikan dan informasikan kepada warga madrasah dalam rangka untuk tetap menjaga semangat kebersamaan. Perkembangan Teknologi Informasi dan

komunikasi (TIK) di dunia pendidikan berperan penting dikarenakan kemajuan teknologi sehingga memudahkan pekerjaan. Termasuk bidang keuangan madrasah.

Pada madrasah ibtidaiyah Darul Huda selalu dikomunikasikan dan informasikan kepada warga madrasah dengan cara menempel di papan pengumuman di depan madrasah, sehingga mempermudah akses bagi siapa saja yang ingin mengetahui keadaan keuangan yang bersumber dari dana BOS. Sedangkan pada MI Al-Istiqamah bentuk informasi terhadap dana pendidikan selain ditempel juga akan diberitahukan pada kesempatan akhir tahun, rapat dengan orang tua santri juga di sampaikan masalah keuangan madrasah.

3. Mekanisme pelaporan dana Pendidikan di madrasah.

Mekanisme pelaporan Dana BOS sesuai ketentuan dari Permendikbud Tahun 2020 No 8, yaitu Sekolah harus menyusun:.

- a. Pembukuan secara lengkap. Pembukuan dalam dengan dokumen pendukung. Penyusunan pembukuan oleh Sekolah yakni Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu pajak, buku pembantu bank serta dokumen lainnya.
- b. Laporan lengkap dengan ketentuan merekapitulasi realisasi penggunaan dana bos reguler atas dasar standarisasi komponen pembiayaan dana BOS Reguler dan pengembangan Sekolah. Melaporkan realisasi pemakaian dana sebagai pemakaian dana BOS Reguler yang diterima Sekolah secara menyeluruh pada tahun berkenaan. Pembuatan laporan ini pada masing-masing tahap dan ditandatangani Bendahara, kepala Sekolah serta Komite Sekolah selanjutnya disimpan. Sekolah melaporkan realisasi penggunaan dana BOS Reguler.

- c. Publikasi seluruh laporan penerimaan dan penggunaan dana BOS Reguler secara terbuka kepada masyarakat. Publikasi dokumen yakni rekapitulasi dana BOS Reguler atas dasar komponen pembiayaan yang ditampilkan di papan informasi Sekolah atau tempat lain sehingga mudah diakses masyarakat.
- d. Format laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah sesuai Permendikbud Tahun 2020 No 8.
- e. Laporan dana BOS Reguler kepada Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai peraturan dan undang-undang.
- f. Laporan pajak pemakaian dana BOS Reguler di Sekolah sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang pajak nasional maupun pajak daerah.

Mekanisme pelaporan dana atau keuangan pada MI Darul Huda Kuin Banjarmasin adalah melalui tahapan-tahapan dilakukan seperti menyusun pembukuan secara lengkap yang disertai dukumen pendukung seperti RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, selanjutnya melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS setelah selesai kami sampaikan kepada kementerian agama, dan selanjutnya publikasi laporan ditampilkan melalui papan informasi madrasah. Demikian juga halnya dengan Madrasah Ibtidaiyah AL Istiqamah juga melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh madrasah lain karna memang itu yang pakai rujukannya oleh semua madrasah di kota Banjarmasin. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem pelaporan telah dilakukan oleh kedua madrasah dengan memperhatikan petunjuk penggunaan BOS dengan baik dan benar.

Kekreativan kedua madrasah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban adalah dengan menggunakan aplikasi .

4. Membangun Kepercayaan (*Trust*) Stakeholder di madrasah.

Mensosialisasikan serta mengaplikasikan seluruh program kerja madrasah merupakan upaya lembaga pendidikan Islam untuk mengenalkan diri kepada masyarakat hingga masyarakat mengetahui keberadaan, keunggulannya dibandingkan dengan sekolah lain. Sosialisasi ini diharapkan mampu mendemonstrasikan keunggulan madrasah yang akan mengubah pandangan masyarakat selama ini, yang diasumsikan madrasah identik dengan terbelakang, kotor dan tidak maju. Keunggulan Madrasah yang ditampilkan di masyarakat akan membuat masyarakat bersemangat dan tertarik dengan lembaga pendidikan Islam. derajat madrasah akan terangkat sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang maju. Citra dan derajat madrasah akan terangkat sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang maju. Keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Kuin Banjarmasin merupakan lembaga pendidikan Islam yang oleh masyarakat sekitar menjadi pilihan utama sebagai tempat mendidik anak anak mereka. Hal ini dikarenakan mempunyai madrasah tersebut menjadikan madrasah tersebut maju dan berkembang serta lebih unggul dibandingkan dengan sekolah lain. Keunggulan Madrasah yang ditampilkan sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat semakin tinggi.

Apa yang sudah berproses pada MI Al Istiqomah Pekapuran Banjarmasin menunjukan bahwa pengelolaan pembiayaan yang sudah

dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien membawa tingkat kepercayaan masyarakat meningkat serta pada akhirnya MI Al Istiqamah menjadi pilihan utama untuk mendidik anaknya disana.

5. Evaluasi Kinerja Penggunaan Keuangan (WTP, WDP)

Kementerian Agama selaku lembaga pemerintah yang menaungi dan membina lembaga pendidikan Islam dari tingkat RA, MI, MTs, dan MA yang memberikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah secara berkala mengaudit, memeriksa pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang sudah dicairkan.

Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Kuin dan madrasah Ibtidaiyah Al Istiqamah Banjarmasin yang merupakan bagian dari MI yang ada di kota Banjarmasin juga selalu diperiksa LPJ nya, dan opini auditnya adalah wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP)

6. Evaluasi Kinerja

Kementerian Agama selaku lembaga pemerintah yang menaungi dan membina lembaga pendidikan Islam dari tingkat RA, MI, MTs,dan MA yang memberikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah secara berkala mengaudit, memeriksa pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang sudah dicairkan.

Hasil pemeriksaan BPK berdasarkan laporan keuangan pemerintah diwujudkan berbentuk opini audit yang mencakup 5 jenis opini, yaitu:

- a. Wajar tanpa pengecualian (WTP). Kesimpulan dari auditor bahwa penyajian laporan keuangan secara wajar.

- b. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP). Kesimpulan dari auditor bahwa penyajian laporan keuangan secara wajar, namun auditor merasa perlu memberi informasi tambahan.
- c. Wajar dengan pengecualian (WDP). Kesimpulan dari auditor bahwa penyajian laporan keuangan secara wajar, pengecualian pada pos tertentu.
- d. Tidak memberikan pendapat (TMP). Kesimpulan dari auditor bahwa apakah penyajian laporan keuangan secara wajar.
- e. Tidak wajar (TW). Kesimpulan dari auditor bahwa penyajian laporan keuangan secara tidak wajar.

Kedua madrasah yang diteliti Madrasah Ibtidaiyah Al Istiqomah dan Madrasah Ibtidaiyah I Darul Huda kota Banjarmasin selalu diperiksa LPJ nya, dan opini auditnya adalah wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP).